

ANALISIS POLITIK DINASTI DI KABUPATEN KEDIRI

Oleh : Novendra Bimantara (NIM: 14010114120009)

(Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang)

Abstrak

Pelaksanaan Pilkada langsung bertujuan untuk memperbaiki demokrasi di daerah dan merupakan wujud implementasi sistem demokrasi serta menghasilkan pemimpin yang bermutu dan berkualitas namun di Kabupaten Kediri berbanding terbalik dengan tujuan pilkada sebenarnya dan yang di Kediri terjadi praktik Politik Dinasti yang sudah berjalan hampir 20 tahun , bisa dibilang Dinasti di Kabupaten Kediri merupakan pertama dan terlama eksistensinya . Politik dinasti merupakan fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Mungkin hal inilah yang menurut beberapa orang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi Penelitian ini membahas bagaimana sebuah Dinasti terjadi,bertahan,berkembang sebuah dinasti ini bisa bertahan dan berkembang di tengah pasang surut demokrasi serta beberapa pro dan kontra mengenai undang-undang pemilu serta siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kelompok yang dinamakan Dinasti Politik., Penelitian ini menggunakan teori oligarki,patron-klien dan dinasti politik . Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana awal mula atau sejarah

sebuah dinasti ini terjadi berawal dari urusan bisnis lalu lanjut ke arah politik , dalam perkembangan dinasti ini hanya orang-orang terdekatlah yang menurut keluarga Sutrisno mampu dan bisa menjalankan atau meneruskan program-program yang sudah dibuat dan belum terlaksana dan banyak kerabat mulai dari golongan pengusaha serta pejabat baik dari tingkat desa hingga daerah yang siap membantu dan mengabdikan kepada dinasti ini dengan tujuan akan mendapatkan imbalan balik.

Dinasti ini juga akan terus terjadi apabila peraturan atau undang-undang yang mengatur sebuah sistem demokrasi tidak mengalami perubahan yang secara pasti . Karena sifatnya yang inklusif dan tertutup membuat sebuah dinasti politik menjadi sangat sulit dicari sebuah kesalahannya . Sangat sulit untuk membongkar praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan pada sekelompok orang yang tertutup, Karena setiap individu berusaha untuk saling menjaga satu sama lain .Sekilas tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang

berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri

Latar Belakang

Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat.¹ Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan.

Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat.² Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina. Dinasti politik tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis-liberal. Tetapi pada hakikatnya dynasti politik juga tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan juga masyarakat monarki, dimana pada system monarki

sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut.

Dinasti politik yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka dinasti politik dapat berarti negatif. Istilah lain yang sepadan dengan pengertian dinasti politik adalah tren politik kekerabatan. Indikasi munculnya praktik politik dinasti di Kabupaten Kediri sudah terlihat sejak pilihan kepala daerah Kabupaten Kediri tahun 2010.³ Ketika itu, Sutrisno telah menjabat sebagai Bupati Kediri dua periode berturut-turut. Dengan alasan tersebut dia tidak bisa mencalonkan kembali pada pilkada 2010. Kemudian, dengan dalih ingin melanjutkan program kerjanya yang belum tuntas, istrinya Haryanti maju dalam pilkada Kabupaten Kediri tahun 2010. Tidak hanya itu, istri keduanya Nurlaila, juga ikut mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Kediri pada waktu yang sama. Lawan dari kedua calon bupati tersebut adalah Sunardi, salah seorang pengusaha yang bertempat tinggal di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Pencalonan dua istri sekaligus dari Bupati Kediri waktu itu kerap disorot oleh pengamat politik dan kelompok masyarakat anti korupsi.

Rumusan Masalah

¹ Ibid., hlm. 27

² <http://bawaslu-babelprov.go.id/index.php/artikerl/item/1631-kekuasaan-dinasti-politik>.

³https://www.researchgate.net/profile/Novy_Yunas/publication/306014895_Pilkada_Serentak_Dalam_Pusaran_Arus_Perubahan_Harapan_Sebuah_Kesejahteraan/links/57aaaed08ae3765c3b50090.pdf?origin=publication_detail

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana asal-usul terjadinya Dinasti Politik di Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten Kediri bekerja dan mempertahankan kekuasaan ?
3. Bagaimana Dinasti Politik di Kabupaten tersebut bisa berkembang ?

Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan asal-usul terjadinya dinasti politik di kabupaten kediri
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana kerja dinasti politik dalam mempertahankan kekuasaan
3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kalangan mana saja yang menjadi pendukung politik setia, bagi dinasti bupati Kediri

Kerangka Teori

1) Dinasti Politik

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan atau memberi sebagian kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Itulah pengertian netral dari dinasti politik.

Terdapat pula pengertian positif dan negatif tentang dinasti politik. Negatif dan positif tersebut bergantung pada proses dan hasil (outcomes) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh jaringan dinasti politik bersangkutan. Kalau proses pemilihannya fair dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya mendatangkan kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka dinasti politik dapat berarti positif. Akan tetapi, bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Selain itu, positif dan negatif arti dinasti politik juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan penegakan hukum, dan pelembagaan politik bersangkutan. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan.

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan

keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.

2) Oligarki

Secara konseptual, istilah Oligarki telah lama dikenal dalam studi politik. Istilah ini merentang dari jaman Yunani Kuno hingga era kontemporer sekarang. Dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Oligarki didefinisikan sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Istilah tersebut diambil dari bahasa Yunani, “Oligarchia”, yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit, terdiri atas kata oligoi (sedikit), dan arkhein (memerintah) (Winters, 2011: 1).⁴ Namun, pengertian singkat tersebut sangat problematis dan tidak memadai untuk mendefinisikan Oligarki. Hal itu karena masih menimbulkan keambiguan makna mengenai Oligarki itu sendiri. Apalagi bila itu disematkan hanya pada konsep “minoritas yang menguasai mayoritas”. Bila konsep Oligarki didasarkan pada hal demikian, maka hampir setiap kekuasaan, pengaruh, atau pemerintahan, yang menempatkan adanya minoritas dalam memimpin, maka dapat disebut sebagai Oligarki.

3) Patron Klien

Hubungan patron-klien digolongkan sebagai hubungan yang tidak sejajar (tetapi tidak mengikat) antara atasan (patron atau

pemimpin) dengan sejumlah bawahan (klien, pelayan, atau pengikut), berdasarkan pertukaran pelayanan yang asimetris, di mana secara *de facto* patron tergantung kepada para klien yang memberi pelayanan cuma-cuma yang bisa mencakup kewajiban secara ekonomis, tugas dengan upah atau tidak, menjadi prajurit perang, dukungan politik dan pelayanan lainnya, diimbangi dengan peran patron untuk menjadi figur pemimpin bagi semua klien dan pemberian bantuan, termasuk pinjaman uang dan perlindungan. Sifat tatap muka relasi patronase menunjukkan bahwa sifat pribadi terdapat di dalamnya. Memang hubungan timbal balik yang berjalan terus dengan lancar akan menimbulkan rasa simpati (affection) antara kedua belah pihak, yang selanjutnya membangkitkan rasa paling percaya dan rasa dekat. Dekatnya hubungan ini kadang diwujudkan dalam bentuk penggunaan istilah panggilan yang akrab bagi patnernya. (Putra, 2007: 5).⁵ Atas dasar kedekatan emosional dan bantuan-bantuan sumber daya itulah Scott membagi ikatan patron-klien menjadi dua ; ikatan yang bersifat afektif dan instrumental. Orang-orang yang terikat karena kedekatan emosional dengan seorang patron merupakan “pengikut inti (*core*)” dari sebuah ikatan patron-klien yang bersifat afektif, dan mereka begitu kuat terikat kepada patronnya. Sedangkan orang-orang yang terikat kepada patron hanya karena hadiah materi atau jasa dianggap sebagai “pengikut pinggiran (*periphery*)” dari ikatan patron-klien yang bersifat instrumental, dan

⁴ Jeffrey A. Winters, Oligarki terj., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. hlm.1

⁵ <http://www.scribd.com/doc/34826071/46/B-Jenis-Hubungan-Sosial>
diakses tanggal 18 Mei 2017.

ikatan ini relatif mudah terlepas (Scott, 1972a : 99)⁶. Walaupun demikian bukan berarti dalam ikatan afektif tidak terjadi pertukaran sumber daya materi ataupun jasa, namun itu bukan satu-satunya alasan terjalannya relasi patron-klien.

4) Shadow State

Definisi mengenai konsep shadow state telah dijelaskan oleh Willian Reno (1995) bahwa shadow state atau lebih kongkrit Pemerintahan Bayangan biasanya akan hadir, tumbuh dan berkembang tatkala terjadi pelapukan fungsi pada institusi pemerintahan formal. penyebabnya antara lain karena para elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekatan sosial, ekonomi dan politik yang dominan berada diluar struktur pemerintahan formal. konsekuensi adanya praktik shadow state ialah penyelenggaraan pemerintahan akan lebih banyak dikendalikan oleh orotitas diluar struktur pemerintahan daripada otoritas formal dalam struktur pemerintahan.

Pembahasan

1) Latar Belakang Terjadinya Dinasti Politik

Dinasti Politik di Kediri dimulai sejak 1999 hingga saat ini masih dipimpin oleh satu keluarga. Fenomena dinasti di

Kediri merupakan salah satu jenis Dinasti Politik Regenerasi , Modelnya seperti arisan keluarga. Ciri dinasti ini adalah kepemimpinan tanpa jeda, yakni satu keluarga memipin satu daerah tanpa jeda.

Pada tahun 1999 pada saat awal pasca reformasi dan pemilu masih belum dipilih oleh masyarakat secara langsung namun dipilih oleh anggota DPRD pada saat itu , bupati terdahulu banyak dari golongan perwira tinggi militer dan akhirnya setelah pasca reformasi baru pemimpin ditunjuk berdasarkan musyawarah anggota legislative daerah atau biasa kita sebut DPRD , pada awalnya beberapa anggota DPRD belum memiliki calon nama untuk dilantik menjadi bupati karena pada saat itu masih belum ada figur yang mampu memipin suatu daerah selain dari golongan militer . Setelah mengalami beberapa kali musyawarah akhirnya munculah nama Ir.Sutrisno yang memiliki latar belakang sebagai PPL pada bidang pertanian. selain melihat dari latar belakang , kinerja dari Sutrisno juga sangat bagus karena ia memiliki semangat juang yang tinggi untuk membawa pertanian di desa menjadi maju dan berkembang . lalu setelah DPRD melalui musawarah akhirnya terpilihlah Ir.Sutrisno sebagai bupati .

Tahun 2004 merupakan tahun dimana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu , pada tahun tersebut bupati Sutrisno sebagai petahana hendak mencalonkan kembali sebagai bupati, beliau merasa bahwa ia mampu membawa dan memimpin Kabupaten Kediri menuju perubahan dan perkembangan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Dan beberapa masyarakat pada saat itu juga

⁶ Dikutip dari rangkuman teori patronase oleh Adi Prasetyo dalam buku James Scoot yang berjudul Moral Petani, Perlawanan Kaum Petani dalam buku Patron Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra terbitan KEPEL PRESS Yogyakarta 2007

merasakan bahwa pak Sutrisno mampu membawa Kediri dalam perubahan . Hal itulah yang menjadi awal kekuasaan Sutrisno dalam dua periode.

Selanjutnya pada 2009 merupakan masa berakhirnya Ir.Sutrisno menjadi Bupati Kediri dan ternyata kekuasaan Sutrisno tidak berhenti selama dua periode, Majunya dua istri bupati Kediri yang notabene mereka itu sebagai madu antara satu dan lainnya dalam Pilkada Kabupaten Kediri periode 2009 - 2014 sungguh menarik untuk diamati. Betapa tidak dengan alasan karena Sang suami tidak bisa mencalonkan lagi menjadi bupati Kediri karena alasan persyaratan (sudah dua kali periode sebagai bupati), maka dia mencalonkan dua istrinya sekaligus sebagai kandidat bupati.Tak dapat dielakan, banyak pihak yang mencium alasan pencalonan mereka dikarenakan “takut” kursi bupati Kediri jatuh ke orang lain atau karena adanya persaingan antara dua orang madu, sehingga persaingan antara dua orang istri ini terjadi.

Setelah lama tak terdengar, isu politik dinasti kembali mencuat pada tahun 2015. Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan pada tahun 2015 Kabupaten Kediri mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember. Pada pilkada serentak saat itu, Haryanti kembali maju sebagai calon bupati petahana. Modus yang digunakan Haryanti kali ini adalah untuk melanjutkan program-program kerjanya yang belum selesai. Banyak media yang menuding bahwa keluarga besar Haryanti sedang membentuk politik dinasti di Kabupaten Kediri.

2) Figur dan Peran Sutrisno

Eksistensi Dinasti Sutrisno pada puncak kekuasaan di Kediri bertahan karena kemampuannya mempergunakan jaringan patronase yang terkonveksikan melalui klientistik sebagai dukungan politik yang terus berkembang dan tak berubah sepanjang zaman serta berkelanjutan dan kepemimpinan yang diterapkan dalam menerapkan metode kepemimpinan yang diterapkan melalui pendekatan dengan metode non formal yang tidak resmi dengan memakai kebijaksanaan secara pribadi tanpa melihat lataran belakang masyarakat.

Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan dalam praktik politik kekeluargaan menjadi semacam mantra yang mampu mengubah relasi formal menjadi personal.

Namun jika bicara soal real politik , dinasti dalam politik itu bisa bertahan karena orang-orang dilingkaran dinasti mempunyai kemampuan dan sumberdaya yang besar. Sementara orang lain tidak bisa menandinginya. Ada pun beberapa faktor yang membuat sebuah dinasti bertahan seperti konsolidasi parpol , konsolidasi proyek , konsolidasi politik dan konsolidasi pokok-pokok organisasi yang dianggap dekat dengan masyarakat.

Sejarah panjang awalnya sutrisno sebelum menjabat menjadi bupati Kediri ialah menjadi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam bidang pertanian figur sutrisno pada saat itu menjadi sangat penting sebelum menjadi ketua DPC PDIP hingga sekarang , pada jaman pasca reformasi pada saat itu banyak elit pejabat yang melihat selain sutrisno memiliki etos kerja yang baik

dan berlandaskan semangat pada saat dahulu bekerja sebagai PPL dalam bidang pertanian yang memiliki etos semangat kerja yang tinggi serta bijaksana dalam setiap mengambil keputusan menjadikan beliau salah satu figur yang sangat penting pada saat itu serta banyaknya relasi dengan pejabat pemerintahan desa dan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di kabupaten Kediri. Maka dari itu beberapa tokoh masyarakat serta elit ysepakat untuk merekomendasikan Sutrisno untuk menjadi bupati pada tahun 1999 atau pasca reformasi pemilihan kepala daerah atau bupati masih dipilih atau ditunjuk oleh DPRD Kabupaten, Sebelumnya juga ada beberapa kandidat yang dicalonkan oleh beberapa anggota fraksi namun pada saat musyawarah akhirnya Sutrisno yang terpilih menjadi Bupati pada saat itu dan setelah itu pada tahun 2004 pemilihan langsung pertama digelar, Sutrisno mencalonkan lagi sebagai Bupati atau Petahana, beliau merasa bahwa mampu program kerja yang beliau terapkan masih harus dilanjutkan atau diteruskan dan beliau merasa masih mampu untuk memimpin Kabupaten Kediri. Setelah mengalahkan beberapa kandidat lain.

3) Desentralisasi Kekuasaan

Membahas mengenai pemerintahan daerah pasti tidak terlepas hubungannya dengan desentralisasi . Menurut pengertian secara umum desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu daerah.

Maka seiring desentralisasi, demokratisasi di daerah justru menjadi proses revitalisasi kekuatan elite lokal atau tradisional untuk berkuasa. Elite lokal berupaya mengukuhkan kembali pengaruhnya sebagai pemain utama. Kewenangan yang sebelumnya hanya ada di pusat, kini digeser ke daerah-daerah. Kepala-kepala daerah itu bisa tumbuh dari bawah (masyarakat). Awalnya tumbuh dari bawah dan disertifikasi (dipilih) dari bawah juga. Tapi sekarang ditarik dari atas (elite lokal). (Kepala daerah) tumbuh dari bawah, dari samping, mungkin dari atas, dan disertifikasinya dari atas.

Pemerintahan yang terdesentralisasi sebenarnya merupakan organisasi yang semi dependen. Artinya, organisasi pemerintahan tersebut memiliki kebebasan (terbatas) bertindak tanpa mengacu pada persetujuan pusat, tetapi statusnya tidak dapat dibandingkan dengan negara berdaulat,⁷ Persoalannya tidak sederhana ketika unit-unit pemerintahan yang terdesentralisasi harus dibatasi kewenangan dan diatur hubungan kelembagaannya satu dengan yang lain. Setiap negara pasti mengalami ketegangan bahkan konflik antarunit atau tingkat pemerintahan sebagai akibat dari penataan kelembagaan yang tidak tepat.

4) Politik Transaksional

Faktor selanjutnya terjadinya politik transaksional antara Sutrisno dengan beberapa Elit di desa ataupun daerah.

⁷ Philip Mawhood, "Decentralization: the Concept and the Practice," dalam Philip Mawhood Ed.), *Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa*, (Chicester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1983).

Selama bekerja menjadi PPL beliau juga menjalin relasi dan melakukan komunikasi kepada banyak pihak terutama pemangku kekuasaan di desa yang ada di wilayah kabupaten Kediri . Beliau menjalin kerjasama dalam bentuk politik transaksional kepada para pejabat pemerintahan desa salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di desa , dampaknya adalah simpati dan dukungan masyarakat agar tertuju pada beliau karena beliau berhasil membantu pembangunan di desa-desa di wilayah Kabupaten Kediri yang selama ini tertinggal dan akhirnya bisa berkembang.

Hal ini dikarenakan kekuasaan incumbent digunakan untuk meningkatkan kekuatan politik para kerabat misalnya dengan menggunakan sumber daya publik untuk pengayaan pribadi atau untuk mendanai partai dan praktik clientelistic yang merupakan pendukung penting suksesnya pemilihan di banyak negara berkembang. Dengan sektor-sektor vital yang telah dipegang oleh anggota keluarga, maka kekuasaan serta kewenangan akan semakin mudah untuk dijalankan. Terdapat bukti nyata bahwa incumbency akan memberikan kesempatan lebih besar pada anggota keluarga untuk menduduki suatu jabatan tertentu dibandingkan dengan kandidat politisi tanpa koneksi kerabat di dalam sistem politik. Di satu sisi keuntungan diperoleh kandidat politik untuk meraup suara dengan memanfaatkan incumbency dalam sistem politik, di sisi yang lain hal tersebut akan menciptakan dinasti politik yang rawan akan penyelewengan etika politik.

Dinasti Sutrisno melihat distribusi sumber daya patron sebagai sebuah kewajiban untuk berbagi dengan warga daerah lainnya melalui ruang-ruang yang disediakan oleh struktur sosial dan ekonomi setempat. Artinya distribusi sumber daya patron tersebut merupakan bentuk kepekaan sosial sebuah dinasti politik terhadap lingkungannya tanpa disertai dengan motif politik. Sebagaimana orang yang pernah menerima jasa-jasa baik, bantuan dan pekerjaan atau jabatan, maka para Klein berusaha membalas kebaikan-kebaikan tersebut dengan tetap setia berada dalam jaringan klien. Mereka berusaha mengidentifikasi diri sebagai klien yang setia kepada patron dengan memberikan dukungan dan mobilisasi suara pada pemilihan Kepala Daerah atau lainnya.

Masyarakat di Kediri seolah-olah sudah dibuat terkondisikan oleh sikap dan kebijakan Sutrisno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi . Pada saat istrinya menjabat dua periode menjadi bupati , Pak Sutrisno juga diberikan jabatan yang sangat penting dalam pemerintahan kabupaten Kediri yaitu menjadi Ketua TPPD , hal inilah yang dimanfaatkan betul oleh beliau dengan melakukan kartelisasi politik dalam bentuk forpimda , banyak relasi pejabat atau orang yang bekerja dibawahnya mengabdikan dengan loyal agar mendapat imbal balik dalam bentuk jabatan atau proyek-proyek strategis dalam pembangunan pemerintahan dengan tujuan agar segala urusan pemerintahan dan kekuasaan yang telah dibangun tetap berjalan sesuai dengan rencana Sutrisno , akhirnya banyak pihak yang berlomba-lomba yang mendekat dan siap membantu Pak Sutrisno dan Bu

Haryanti baik dari orang lama atau orang baru. Hubungan timbal balik antara patron-klien yang saling menguntungkan inilah yang menjadikan bertahannya sebuah kekuasaan dalam satu wilayah .

Ini merupakan salah satu bentuk pendekatan politik dengan cara melibatkan masyarakat dalam proyek ekonominya. Apalagi didukung dengan adanya anggaran dana desa dari pemerintahan pusat juga menjadikan segala kebijakan dari Sutrisno yang dibuat melalui istrinya bisa berjalan dengan efektif. Dengan berada dibalik layar Sutrisno bias lebih leluasa dalam mengatur jalinan relasi keluarga yang menduduki kursi daerah beserta pejabat legislatifnya untuk tetap solit dan konsisten pembanguna politik dinasti.

5) Karakteristik Masyarakat Kediri

Dengan bentuk karakteristik masyarakat mataraman Kediri yang sangat kental , Kediri yang terletak di bagian barat wilayah provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang sangat kental dengan budaya mataraman terutama mataraman Islam , banyaknya pondok pesantren di kabupaten Kediri sebagai ciri khas yang kental dengan karakter mataraman Kediri , “ nderek kersane mbah yai” merupakan kalimat atau istilah yang biasa kebanyakan orang Kediri ucapkan yang tinggal di desa dan daerah sekitaran pondok pesantren

Maksud dari kalimat tersebut adalah ikut apa kata kyai , apabila para kyai sudah memerintahkan maka bagi para warga atau masyarakat penganut agama Islam hal tersebut adalah anjuran yang harus ditaati atau diikuti dan sangat sukar untuk ditentang

. Maka dari itulah sejak hampir 15 tahun lebih , Sutrisno sangat tahu bagaimana betul cara menarik massa untuk mendukungnya , selain tokoh elit partai dan pengusaha beliau juga menjalin hubungan dengan banyaknya tokoh agama ulama dan kyai pimpinan pondok pesantren

Dalam kehidupan tradisional orang Jawa hubungan antara hamba dan tuan bukan bersifat tak pribadi; sebaliknya, hubungan ini lebih bersifat pribadi dan akrab, saling hormat dan bertanggung jawab. Secara ideal, hubungan ini menuruti contoh kasih sayang dalam keluarga⁸.

6) Relasi Kapitalis-Birokrasi

Ada banyak alasan untuk menyimpulkan politik dinasti dan dinasti politik bisa tumbuh subur di Indonesia, baik dilihat dari faktor budaya, kognitif-emosional, maupun sosial-ekonomi. Kecenderungan pengkultusan tokoh yang dikelilingi sejumlah mitos, jejak- jejak feodalisme yang masih tampak jelas, struktur dan interaksi sosial yang masih tak egaliter, dan kesenjangan antarwarga dalam ekonomi dan pendidikan, bisa jadi alasan tersebut .

Pertama-tama, yang perlu diletakkan terlebih dahulu dalam membahas perkembangan dinasti politik di daerah adalah memerhatikan jaringan kekuasaan terbentuk dalam ranah formal dan informal yang umumnya terjadi dalam nalar

⁸Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX. Jakarta. Yayasan Obor

ekonomi-politik. Hal tersebut dilakukan kepala daerah sebelum pada langkah berikutnya mulai menempatkan kerabatnya sebagai proyek dinasti politik. Adapun jejaring kekuasaan kepala daerah tersebut dibangun atas sinergitas birokrasi, kapitalis, dan politisi yang membentuk jaringan kuasa formal dan informal dalam masyarakat aras lokal. Narasi mengenai politisasi fungsi maupun mobilisasi birokrat menjadi agen penting vote getter dalam Pemilu tidak bukanlah praktik baru karena hal itu sudah banyak dilakukan di berbagai tingkatan kota dan kabupaten. Politisi biasanya digunakan untuk mengamankan pencalonan kerabat yang hendak maju dalam Pemilu tidak maupun jabatan strategis lainnya di daerah.

7) Faktor Familisme atau Keluarga

Dinasti politik familisme berbasis populisme yang ditonjolkan dalam suksesi pemerintahan adalah upaya “mengamankan” program kepala daerah sebelumnya. Hal ini terkait reproduksi wacana heroism dan populisme program pemerintahan sebelumnya yang dijadikan bahan kampanye kerabat untuk menggantikan kerabatnya yang lain. Meskipun istrinya telah menjadi bupati formal, suami masih berperan besar dalam bupati informal yang bisa memberikan masukan tertentu kepada istrinya. Artinya, pengaruh maskulinisme kuasa keluarga masih berlaku dalam pemerintahan sekalipun kedudukan istrinya lebih tinggi sebagai bupati daripada suaminya yang kembali sebagai kawula biasa.

Kondisi itu turut juga mengubah paradigma rumah tangga yang semula hanya berwujud satu rumah kini telah berwujud daerah. Dalam tataran inilah, “kuasa gonogini” tersebut berlaku. Istri berada di ranah domestik formal sementara suami berada di arena sosial informal. Pada akhirnya model dinasti politik yang seperti ini berbentuk pemerintahan boneka karena yang sebenarnya berkuasa adalah suaminya, sementara istrinya hanya menjadi simbolis pemerintahan. Preferensi pemilih di ketiga daerah ini dalam memilih kepala daerah masih dibayang-bayangi populisme kepala daerah yang terdahulu sehingga calon kepala daerah yang dipilih biasanya yang mendekati figur atau memiliki ikatan langsung dengan kepala daerah tersebut. Bahkan tidak mungkin kalau suami tersebut terbebas dari masa kurungan tersebut akan kembali menjagokan kembali menjadi bupati menggantikan istrinya. Dalam model dinasti politik seperti ini, aroma oligarki terasa namun tidak begitu kuat karena sebenarnya yang dibangun adalah romantisme dan populisme yang berbaur dengan oligarkis. Oleh karena itu, menyebutnya sebagai bentuk mafia lokal dalam istilah Sidel agaknya kurang tepat untuk mendeskripsikan konteks ini.

Masyarakat yang sejatinya menjadi aktor utama dalam proses demokratisasi lokal di daerahnya justru malah menjaga status quo kepemimpinan oligarkis ini sebagai bentuk loyalitas dan afinitas terhadap redistribusi program populis yang dijalankan melalui skema politik ‘gentong babi’. Untuk itu, penulis lebih menyebut dinasti politik dalam ketiga kasus ini sebagai populism oligarchy atau populism dynasties

karena logika oligarki dibangun atas popularitas calon yang didukung program populis melalui politisasi anggaran.

Selama hampir kurang lebih 15 tahun menjalankan dinasti politik, Sutrisno dan keluarga sudah menguasai beberapa aset penting di daerah kabupaten Kediri, tidak hanya Sutrisno, beberapa anggota keluarga beliau juga menjabat pada jabatan strategis baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini lah yang juga menjadi faktor pendukung Sutrisno dalam mengembangkan kekuasaannya dalam bentuk dinasti politik. Seperti contoh adik ipar Sutrisno, H. Sulkani adalah ketua DPRD Kabupaten Kediri selain itu ada Rahmadi Yogiantoro yang menjadi menantu beliau bekerja sebagai Ketua KADIN dan juga Ketua Karangtaruna Kabupaten Kediri dan ada beberapa anggota keluarga lain yang menjabat posisi strategis pada sektor pemerintahan. Selain itu juga faktor civil society yang tidak terorganisir membuat pemerintahan Sutrisno sangat minim diserang oleh beberapa isu-isu buruk dan lawan-lawan politiknya, hal ini bisa terjadi karena Sutrisno berhasil mengondisikan masyarakat Kediri serta sifat dinasti politik sendiri yang sangat inklusif.

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi rakyat. Tetapi dalam pemilihan ketua umum partai atau pejabat lainnya rakyat tidak memilihnya melainkan anggota partai tersebut yang memilihnya. Sebagai contoh Pak Sutrisno sebagai ketua DPC langsung menunjuk Istrinya untuk menjadi calon bupati dari partai PDIP, padahal Haryanti sendiri bukan kader atau anggota partai. Beliau juga berasalan bahwa

hanya Bu Haryanti lah yang mewarisi ketrampilan politik dari Pak Sutrisno sendiri. Tentu beberapa rakyat menilai itu menyalahi etika politik, tetapi beberapa anggota partai tersebut menyatakan tidak karena itu pemilihan yang dilakukan dalam partai mereka. Walaupun kita kembali mengingat partai politik merupakan wadah aspirasi masyarakat dalam berpolitik. Kurangnya sosok figur atau lawan politik yang memiliki elektabilitas yang tinggi juga menjadikan salah satu penyebab berkembangnya dinasti ini, secara tidak langsung di internal partai PDIP sendiri Sutrisno juga sudah mematikan fungsi partai politik itu sendiri, mencari pemimpin-pemimpin baru yang ideal dari kader-kader partai. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Kediri beberapa tahun terakhir juga mengalami penurunan dalam tingkat partisipasi pemilih yaitu hanya sekitar 60%. Dinasti politik memang merupakan produk dari demokrasi modern. Tapi keberhasilan dalam membentuk sebuah dinasti politik itu sendiri, diserahkan pada pasar, yaitu pemilih dalam pemilu.

8) Hubungan Patron dan Klien

Secara umum, basis fondasi kekuasaan formal dinasti politik lokal di Indonesia dibangun berdasarkan hubungan paternalistik melalui redistribusi program populis yang dihasilkan melalui skema politik 'gentong babi' (pork barrel politics) maupun politisasi siklus anggaran (political budget cycle). Hal itulah yang kemudian mendorong adanya hubungan kedekatan maupun romantisme antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasif

melalui gelontoran uang hingga ke pelosok. Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal masyarakat menjadi bagian intimitas yang bertindak sebagai agen intermediasi dalam memenangkan dan melanggengkan kekuasaan famili politik.

Perbincangan mengenai dinasti politik dalam ranah politik lokal sangatlah berbeda dengan konteks dinasti politik yang terjadi di level nasional. Dalam ranah lokal, romantisasi nama besar familisme menjamin suatu dinasti politik dapat eksis secara terus-menerus. Familisme sendiri dibentuk atas tiga hal, yakni figur (personalism), klientelisme (clientelism), dan tribalisme (tribalism), sebagai ketiga kunci dalam mengurai basis-basis terbentuknya tren familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia (Allen 2012:7).

Ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang dilakukan dalam dua jenis yakni secara by design dan by accident. Dinasti politik yang by design sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah kuat relasionalnya sehingga kerabat yang ingin memasuki kancah pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu.

Banyaknya kerabat Sutrisno mulai dari tingkat desa hingga daerah menjadi faktor selanjutnya, seperti halnya hubungan patron-klien apabila orang-orang yang sudah diberi kepercayaan Sutrisno dan mampu menjalankan tugas atau perintah yang diberikan maka ia akan mendapatkan imbalan baik secara materiil maupun

imateriil adapun dalam bentuk jabatan atau diberikan proyek-proyek pembangunan strategis. Mendekati pemilihan bupati yang akan digelar pada tahun 2019, salah satu anggota keluarga dari Sutrisno yaitu Yogi Rahmanto yang bertatus sebagai menantu, Beberapa waktu akhir ini mulai berusaha mencari simpati serta suara beberapa elemen masyarakat Kediri terutama golongan pemilih muda pemula dengan cara mengadakan acara-acara yang sifatnya partisipatif. Yogi Rahmanto disini bertindak sebagai Ketua Penyelenggaranya atau Pelaksananya, hal ini merupakan salah satu bentuk marketing politik dengan tujuan agar masyarakat mengenal Yogi Rahamanto sebagai seorang politisi ataupun figure yang sangat dekat dengan warga. koneksi kekerabatan atau kekeluargaan dalam ranah politik sangat menguntungkan bagi kandidat, Dimana kandidat dapat memanfaatkan nama besar keluarga dengan jabatan tinggi di dalam sistem politik untuk meraup suara. Hal inilah merupakan salah satu bentuk dari kesiapan keluarga Sutrisno dalam melanjutkan estafet kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Kediri.

9) Praktik Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kediri

Pada lembaga eksekutif di Kabupaten Kediri, terdapat 1 aktor utama yang memiliki peranan penting dalam konstelasi selama masa kepemimpinan Haryanti, yaitu adalah suaminya sendiri Ir.Sutrisno yang juga adalah mantan bupati Kediri selama dua periode. Selain itu ada

juga aktor yang memiliki peran penting pada lembaga legislative yaitu H.Sulkani yang tidak lain adalah saudara dari Sutrisno. Kendati diantara kedua aktor ini memiliki kepentingan dan sumberdaya politik yang berbeda, namun relasi antara keduanya cukup solit pada pemerintahan kabupaten Kediri.

Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa antara dua aktor tersebut dapat membangun relasi kekuasaan yang relative cukup solid. Faktor pertama karena direkat oleh adanya ikatan kolega birokrat. Sulkani dan Sutrisno adalah kedua aktor yang sudah lama berkecimpung dalam dunia perpolitikan di Kediri, dua orang ini selalu mendapatkan jabatan strategis pada saat masih menjabat. Hubungan inilah yang telah menjadi trust building antara mantan ketua bupati dan ketua DPRD.

Dalam beberapa temuan dari narasumber yang saya dapat juga dikatakan bahwa Sutrisno mengintervensi aparat atau birokrat agar mereka bersedia melaksanakan perintah Sutrisno. Selain itu juga ketika dalam rapat atau kunjungan kerja kehadiran Sutrisno selalu tidak jauh dari samping Haryanti, dalam beberapa kegiatan Sutrisno juga ditunjuk untuk memimpin rapat kerja, sedangkan Haryanti sebagai bupati yang memiliki legitimasi untuk memimpin rapat maupun briefing hanya banyak diam.

Ada beberapa kebijakan ataupun peraturan yang dibuat dan dikeluarkan pemerintah kabupaten Kediri yang tidak jauh dari campur tangan Sutrisno, disini dapat disimpulkan bahwa Haryanti hanyalah wayang sedangkan Sutrisno adalah wayang. Beliau bertugas untuk memerintahkannya, menggerakkan dan mengarahkan istrinya

dalam setiap hak politiknya agar sesuai dengan yang diperintahkan. Padahal Sutrisno sudah jelas hanya sebagai mantan bupati yang tidak memiliki legitimasi dalam pemerintahan namun fakta dilapangan justru berbanding terbalik terhadap itu.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data yang sudah didapatkan pada proses penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Jika kita berbicara politik dinasti, tidak ada peraturan yang tidak memperbolehkan dinasti politik tetapi negara kita ini bernama Republik Indonesia. Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *res publica*, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat.

Negara ini juga menganut demokrasi pancasila yang berarti paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dinasti Politik yang di bentuk keluarga Sutrisno dari awal pasca reformasi hingga kini dan kemungkinan akan terus berjalan karena tidak adanya figure yang memiliki elektabilitas yang sama dan bahkan melebihi keluarga Sutrisno. Selain itu matinya fungsi partai politik untuk mencari kader-kader politik terbaik dari internal partai itu sendiri mengakibatkan tidak

adanya pemimpin-pemimpin baru yang bisa berkembang dan mampu memimpin dan membawa sebuah pemerintahan ke era yang baru .

Hubungan Patron-Klien sangat kuat yang mendukung dinasti ini akan terus berjalan sampai kapanpun , dan tentunya sangat sulit untuk memutus rantai hubungan ini karena sudah berjalan belasan tahun lebih . Regenerasi hubungan antara Patron dan Klien juga masih sangat kuat hubungan mereka dari bapak hingga ke anak dan bahkan hingga cucu nya kelak juga menjadi faktor pendukung. Selama hampir 15 tahun lebih berkuasa bukan tidak mungkin banyaknya asset-aset penting di dalam daerah yang dimiliki dan dikuasi oleh keluarga Sutrisno , hal inilah sesuai dengan teori oligarki apabila seseorang dapat menguasai Sumber daya yang ada di daerah itu maka ia akan memiliki kekuasaan yang sifatnya mutlak . Sumber daya kekuasaan yang dimaksud mencakup hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (coercive power), kekuatan mobilisasi dan kekuasaan material (kekayaan).

Dinasti ini juga akan terus terjadi apabila peraturan atau undang-undang yang mengatur sebuah sistem demokrasi tidak mengalami perubahan . Karena sifatnya yang inklusif dan tertutup membuat sebuah dinasti politik menjadi sangat sulit dicari sebuah kesalahannya . Sangat sulit untuk membongkar praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan pada sekelompok orang yang tertutup, Karena setiap individu berusaha untuk saling menjaga satu sama lain .Sekilas tidak ada

yang salah dengan politik dinasti. Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri.

Demokrasi dicirikan oleh setidaknya tiga karakter. Pertama, pembagian kekuasaan ala trias politika yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses check and balances antar lembaga pemerintah. Kedua, demokrasi dicirikan dengan suksesi kepemimpinan yang terbuka, melalui mekanisme pemilihan umum yang adil, jujur dan terbuka. Ketiga, rakyatlah pemegang kedaulatan, bukan pemerintah apalagi politisi.

Dengan maraknya dinasti politik, tiga pilar demokrasi itu berada dalam ancaman besar. Sistem check and balances dipastikan tidak akan berjalan efektif manakala semua lini dikuasai orang-orang yang sekerabat. Rapat-rapat atau sidang-sidang yang sedianya menentukan hajat hidup orang banyak justru lebih mirip arisan keluarga. Jika sudah demikian, maka sudah sepatutnya kita mengucapkan selamat tinggal good governance.

Saran

Beberapa saran penting yang direkomendasikan untuk mengurangi gejala proliferasi dinasti politik yang ada di kabupaten Kediri :

Pertama, untuk mengurangi dan/atau menghambat proses perluasan praktik

dinasti di daerah suatu ikhtiar komprehensif yang lebih serius, sistematis dan tentu saja legal penting dilakukan, baik melalui perangkat peraturan perundangan maupun melalui proses edukasi politik masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran publik perihal potensi buruk dampak praktik dinasti dalam kehidupan sosial-politik di daerah. Selain itu, kontrol dan pertimbangan oleh masyarakat sipil terhadap kekuasaan pemerintahan daerah juga perlu ditingkatkan dengan memperkuat peran-peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, upaya mengurangi dan/atau menghambat proses merebaknya kebangkitan dinasti politik dan gejala proliferasinya di daerah juga perlu dilakukan pada sisi hulu proses pilkada, dengan antara lain memperkuat kelembagaan partai-partai politik di daerah serta meningkatkan integritas para elitnya sedemikian rupa sehingga tidak mudah terjebak dalam pusaran politik transaksional dengan para pemilik modal (local strongmen, local bossis) yang selama ini praktis mengendalikan proses kandidasi dan perhelatan pilkada untuk kepentingan keluarga dan kelompok oligarkhnya sendiri.

Ketiga, untuk memetakan lebih tajam dan komprehensif terkait gejala proliferasi dinasti ini, suatu penelitian lebih lanjut penting dilakukan, terutama dalam rangka mendeteksi dan memetakan berbagai dampak negatif dari praktik dinasti dan proliferasinya di berbagai daerah. Dalam kaitan ini, penulis sendiri sedang terus melakukan riset di Kediri terkait dampak buruk praktik dinasti terhadap

perkembangan demokrasi dan merebaknya praktik-praktik korupsi di daerah dan yang terakhir, Diperlukan adanya supremasi hukum yang jelas untuk mencegah hal-hal atau dampak negative yang ditimbulkan akibat dari politik dinasti serta perlu dibentuknya payung hukum yang memadai dan tidak mencederai HAM untuk mencegah makin berekembangnya politik dinasti di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ibid., hlm. 27

http://bawaslubabelprov.go.id/index.php/arti_kerl/item/161-kekuasaan-dinasti-politik.

https://www.researchgate.net/profile/Novy_Yunas/publication/306014895_Pilkada_Sere_ntak_Dalam_Pusaran_Arus_Perubahan_Har_apan_Sebuah_Kesejahteraan/links/57aaeed08ae3765c3b50090.pdf?origin=publication_detail

Jeffrey A. Winters, *Oligarki terj.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. hlm.1

<http://www.scribd.com/doc/34826071/46/B-Jenis-Hubungan-Sosial>
diakses tanggal 18 Mei 2017.

Dikutip dari rangkuman teori patronase oleh Adi Prasetijo dalam buku James Scoot yang berjudul Moral Petani, Perlawanan Kaum Petani dalam buku Patron Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra terbitan KEPEL PRESS Yogyakarta 2007

Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta. Yayasan Obor

Eriyanto. 2012. *Dinasti Politik dalam Pilkada: Menguntungkan atau Merugikan Kandidat? (Kasus Pilkada Kabupaten Kediri)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 36, MIPI, Jakarta, hal. 68-90

Djati, Wasisto Raharjo. 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. Jurnal sosiologi masyarakat, LabSosio Universitas Indonesia, Vol. 18. No 2., hal. 181-231

Aspinall, Edward, *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Jakarta, 2014

Bragança, Arthur and Rio Juan Rios. *Political Dynasties and the Quality of Government*. Web.Stanford.Edu.